

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan baik bagi perusahaan, organisasi swasta, keagamaan, pemerintahan maupun nirlaba lainnya. Organisasi keagamaan sangat bergantung terhadap adanya donatur, keberadaan jamaah serta integritas organisasi, maka dari itu masjid juga memiliki tanggung jawab terhadap berbagai lapisan *stakeholder* untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Organisasi keagamaan seperti masjid juga memiliki tanggung jawab moral didalam aktivitasnya yaitu dengan cara yang akuntabel dan transparan karena biasanya organisasi nirlaba beroperasi untuk masyarakat (Carrol, 1991). Akuntabilitas dan transparansi diperlukan agar pengguna laporan keuangan mengetahui pada kondisi dan kinerja masjid, melalui penyajian yang transparan dan akuntabel pengguna laporan keuangan dapat serta meminimalisir kecurangan yang dilakukan pihak pengurus (Gultom, 2015).

Fenomena rumah ibadah yang tidak membuat laporan keuangan dalam pelaksanaannya dan masjid yang tidak berjalan secara efektif dan efisien saat ini sangat banyak kita dapati. Para pengelola tidak menyadari bahwa hal ini dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat serta asumsi ketidak terbukaan pengurus masjid terhadap amanah dana yang disumbangkan untuk masjid. Akuntabilitas bagi sebagian orang tidak diperhatikan, hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa apapun yang dikerjakan manusia itu dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Swt. Sebagian rumah ibadah laporan keuangan yang dibuatnya

laporan sederhana yang berbentuk empat kolom yang terdiri dari uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo.

Literatur sebagian besar berpendapat bahwa laporan keuangan tradisional memberikan peran terbatas dalam pemakaian akuntabilitas karena mereka tidak memberika informasi tentang aspek aspek keberhasilan, kinerja dan dampak (Torres dan Pina, 2003). Dalam organisasi keagamaan dan NGO juga terjadi skandal, manipulasi, dan korupsi, hal ini dibuktikan pada laporan 2012 *Marquet* di penggelapan di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa NGO dan organisasi keagamaan memilki sekitar seperdelapan dari seluruh insiden penggelapan utama, hal ini menunjukkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan responsibiliti (Mahmudi, 2005) dalam (Simanjuntak dan Januarsih, 2009), akuntabilitas merupakan konsep yang abstrak dimana mekanismenya berbeda beda dalam setiap organisasi. Gelfand et al (2004) memandang akuntabilitas sebagai persepsi yang bertanggung jawab atas tindakan yang sesuai dengan kontijensi interpersonal, sosial, dan struktural.

Transparansi merupakan tersedianya informasi relevan dan dapat dipercaya mengenai kinerja, posisi keuangan, dan tata kelola perusahaan nonprofit organisasi (Patrizia dan Massimo, 2014). Adanya akuntabilitas dan transparansi dapat membantu mengurangi kebocoran yang terjadi seperti korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan masjid. Piotrowski dan Van Ryzin menemukan bahwa transparansi dan kebebasan informasi dari pemerintah, akan

lebih sulit untuk meminta pejabat atau pengelola keuangan bertanggungjawab atas tindakan mereka, akan tetapi dengan mengeluarkan informasi akan mendorong akuntabilitas yang demokratis. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar pengguna laporan keuangan mengetahui pada kondisi dan kinerja masjid. Melalui penyajian yang transparan dan akuntabel pengguna laporan keuangan dapat ikut serta dalam meminimalisir kecurangan yang dilakukan pihak pengurus (Gultom, 2015). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaannya, maka dibutuhkan pelaporan keuangan yang meliputi transaksi keuangan mengenai sumber daya, pendapatan dan beban, dimana pelaporan tersebut dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti donator, dan jemaah untuk mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan bermanfaat. Untuk mewujudkan lembaga keuangan masjid yang profesional dibutuhkan pengelolaan yang berbasis manajemen, terutama berkaitan dengan ketersediaan dalam membuka data dan informasi pengelolaan keuangan masjid dimulai dari penerimaan dana hingga penyaluran dana.

Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangatlah penting bagi pengelolaan keuangan masjid salah satunya pendapat dari bapak Husein Satriawan sebagai kepala takmir Masjid Agung Sumenep mengatakan bahwa amanah dari masyarakat harus memiliki pertanggung jawaban yang dapat diketahui masyarakat, sebagai contoh dengan menulis jumlah sumbangan yang masuk pada papan yang tersedia di masjid, dan melaporkan ke Baznas karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pengelola, karena itu amanah dari jemaah untuk masjid. Masjid merupakan entitas publik dimana nilai-nilai keagamaan harus dijunjung tinggi serta

dikembangkan, pembangunan masjid memiliki kepengurusan yang terdiri dari beberapa orang dan anggota yang mengelola dana keuangan masjid untuk keberlangsungan pembangunan masjid tersebut. Karakteristik organisasi nirlaba memiliki perbedaan dengan organisasi profit, dalam organisasi nirlaba sumber daya yang diperoleh bersumber dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Masjid Agung Sumenep merupakan salah satu bangunan dari 10 masjid tertua di Indonesia yang memiliki gaya arsitektur indah dan unik (Portal Madura). Masjid Jamik Sumenep terletak menghadap Taman Adipura yang dibangun pada masa Adipati Pangeran Natakusuma 1 yang biasa dikenal Panemabahan Somala.

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid seperti penelitian yang dilakukan Eka Siskawati, dkk (2015) penelitian tersebut menguji model akuntabilitas masjid dan hubungannya dengan budaya organisasi serta pembelajaran organisasi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas keatas tidak berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi, yang mengimplikasikan bahwa lemahnya tuntutan donatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana oleh manajemen masjid.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Danjaya, dkk (2019) mengenai *Value* praktik akuntabilitas dan transparansi tanah lot. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasil akuntabilitas yang dilakukan oleh pengelola sudah terdokumentasi, kemudian pada transparansi dilakukan oleh pengelola masih kurang terutama dalam hal keuangan pengelola masih cenderung tertutup. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Khairaturrahmi, dkk (2018) mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid di Kota

Banda Aceh. Hasil dari penelitian tersebut bahwa masjid di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya akan tetapi pengurus tetap membuat laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk *single entry*. Kemudian pada transparansi cukup transparan dengan adanya laporan keuangan yang dapat diakses jamaah pada media dan dipublikasikan oleh pengurus masjid.

Peneliti memilih topik ini karena melihat pentingnya Akuntabilitas serta transparansi pada suatu organisasi, baik organisasi profit, non profit, keagamaan dan organisasi lainnya di dalam mewujudkan suatu tata kelola yang baik atau *good corporate/publik governance*. Terkait pemilihan lokasi penelitian karena Masjid Jamik Sumenep merupakan masjid peninggalan Keraton Sumenep yang dibangun sejak 1779 hingga 1787 dengan arsitek asal Tiongkok yang bernama Lau Piango dan masjid ini menjadi salah satu tujuan wisatawan (religi) yang selalu ramai dikunjungi (Husein Satriawan, Ketua Takmir Masjid agung Sumenep), berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Takmir masjid pengunjung luar daerah yang datang ke masjid pada tahun 2013 sebanyak 40.750 dan terus meningkat setiap tahunnya. Ini mencerminkan bahwa Masjid Jamik Sumenep memiliki daya tarik yang cukup tinggi sehingga peneliti tertarik untuk memilih Masjid Jamik Sumenep sebagai lokasi penelitian.

Kepengurusan Masjid Jamik Sumenep terdiri dari nadzir dan pengurus takmir dimana nadzir selaku pewakif dengan kewenangannya dapat mengangkat dan memberhentikan Majelis fatwa dan Ketua Takmir masjid, sedangkan Ketua Takmir diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus lainnya. Pemegang kekuasaan untuk membuat laporan keuangan merupakan bendahara I,

hal ini sesuai dengan kesepakatan pengurus yang beralasan agar setiap pendapatan dan pengeluaran langsung dicatat dan memudahkan pencatatan.

Akuntabilitas dan transparansi pada Masjid Jamik Sumenep dijalankan sesuai kebiasaan dan kemudahan masyarakat dalam mengetahui pengelolaan keuangan. Perhitungan kotak amal biasa dilakukan setiap minggu, perbulan, pertahun, dan kotak amal kegiatan dihitung setiap ada kegiatan masjid. Dan dicantumkan pada papan pengumuman yang ada pada gerbang masuk Masjid Jamik Sumenep. Akuntabilitas bagi sebagian orang kurang diperhatikan, hal ini karena mereka menganggap bahwa semua hal yang dilakukan manusia dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah SWT. Akan tetapi diantara masyarakat dan pengurus keduanya juga masih membutuhkan pengelolaan keuangan serta laporan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada jamaah. Peneliti tertarik untuk mengetahui kajian dalam pengelolaan keuangan pada masjid yang merupakan organisasi nirlaba yang harus memberikan laporan keuangan secara teratur sebagai bentuk tanggungjawab kepada jamaah atas keuangan yang disumbangkannya. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ingin mengetahui tentang bentuk nyata pelaporan keuangan yang dikelola pengurus masjid, serta bagaimana bentuk transparansi pengurus terhadap pengelolaan keuangan masjid untuk masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apabila amanah dapat dijalankan dengan baik maka kepercayaan masyarakat akan didapatkan. Hal ini akan berdampak baik untuk masjid serta kepada pemegang amanah dalam melakukan tugasnya. Persoalan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai “Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Masjid Jamik Sumenep?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada masjid.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan dan manfaat, manfaat tersebut ada yang bersifat teoritis dan bersifat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Dapat menambah wawasan mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam lingkungan organisasi keagamaan.

2. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan bahwa peneliti bisa memberikan suatu informasi dan bahan masukan kepada pengurus masjid tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dari penggunaan dan laporan keuangan untuk pengelolaan keuangan masjid dengan pendekatan studi kasus. Bagi jamaah penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan tentang pelaporan keuangannya dan jamaah dapat mengetahui aliran dana yang masuk dan keluar tanpa merasa khawatir tentang infaq yang dilakukan jemaah.

